

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, 2015, *Pedoman Auditor Manajemen Keselamatan, Kementerian Perhubungan*, Jakarta.

D.A Lesse, 2014, *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan Dan Pemanduan Kapal*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Kansil, C.S.T., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Keraf, Gorys, 1980, *Komposisi*, Nusa Indah.

Raharjo, Hanri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.

Santosa, Djohari, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perkapalan*, UII Pers, Yogyakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.

Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.

Sukirno, 2005, *Hak Ulayat laut dan Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Soedjono, Wiwoho, 1981, *Hukum Perkapalan dan Hukum Pengangkutan Laut*, PT Bina Sarana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Ilmu*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali Press, Jakarta.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang – undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Ordonansi Mahkamah Pelayaran S.1934-215 bsd.S.1938-2, bsd. S.1947-66 dan S.1949-103.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal,

Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor HK.208/01/XI/MP.2015 tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL DAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH  
PELAYARAN**

APRY LIANI YUYUN PR, Prof. Dr. Sulistiowati, S. H., M. Hum.; I G A M Wardana, S. H., M. Hum.; Hariyanto, S. H., M.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**Kamus**

Suharso dan Retnoningsih, Ana, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
CV Widya Karya, Semarang.